

Aksi Damai Hitam Kamisan di Depan Istana Negara Presiden-Kamisan ke-143
JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan)
Jl. Bonang No. 1A, Menteng, Jakarta 10320, Telp.(021) 31931181

Nomor : 111/Surat Terbuka_JSKK/I/2010

Hal : **Tegakkan Hukum Bagi Para Pelanggar Hak Asasi Manusia**

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
Di –
Jakarta

Bapak Presiden yang kami hormati,

Penegakan hukum terutama bagi para pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) masih jauh dari harapan kami para korban. Tidak ada satu pun kasus pelanggaran berat HAM masa lampau dituntaskan. Penegakan hukum bagi para pelanggar HAM masih terhenti di Kejakaan Agung dengan alasan politik, salah satunya menunggu rekomendasi politik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kejaksaan Agung hingga saat ini masih menolak untuk melakukan penyidikan. Kami sangat kecewa dengan penegakan hukum yang masih terkesan tebang pilih. Para pelanggar HAM hingga sampai saat ini masih terbebas dari jeratan hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 amandemen ke-3. Untuk itu penegakan hukum harus menjadi cermin bagi tercapainya keadilan. Kami para korban sampai saat ini belum mendapatkan keadilan. Karena negara belum mampu untuk memberikan penghukuman kepada para pelaku yang telah melakukan pelanggaran HAM. Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia Hukum untuk memberantas mafia peradilan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak, pemberantasan praktik korupsi dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu adalah dua hal yang harus menjadi prioritas didalam penegakan hukum. kedua kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang luar biasa *extra ordinary crime*.

Bapak Presiden yang kami hormati,

Sampai saat ini kami belum melihat komitmen yang serius dari Bapak Presiden untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lampau. Padahal, pada 2008 yang lalu ketika kami bertemu dengan Bapak Presiden, Bapak menjanjikan akan segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Suara kami rakyat yang menjadi korban kekerasan di masa lalu haruslah didengar, sekecil dan selirih apapun. Karena Bapak bisa menjadi Presiden karena rakyat telah memberikan kepercayaan. Untuk itu segera tegakkan hukum bagi para pelanggar HAM. Kejaksaan harus segera melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).

Jakarta, 14 Januari 2010

Salam dan hormat kami,

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan

Sumarsih

Suciwati

Bedjo Untung

Tembusan kepada:

1. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)